

Sumpah Pemuda dan Tumbuhnya Kesadaran Berbangsa

Effendi Wahyono

Universitas Terbuka Indonesia

effendi@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK - Peristiwa sejarah Soempah Pemoeda atau Sumpah Pemuda yang diikrarkan tanggal 28 Oktober 1928 merupakan peristiwa besar dalam sejarah Indonesia. Sumpah pemuda adalah komitmen para pemuda Indonesia dari berbagai suku bangsa dan agama untuk menyatukan diri mewujudkan Indonesia merdeka. Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana rasa satu bangsa di kalangan pemuda terbentuk dan siapa penggerakannya. Penelitian dilakukan dengan metode sejarah, dengan menggunakan sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan telah melahirkan kesadaran kepada Bangsa Indonesia bahwa nenek moyang Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Feodalisme dan penjajahan menyebabkan Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang miskin, bodoh, dan tertindas. Para pemuda yang terdidik merupakan penggerak dari perjuangan Bangsa Indonesia. Rasa persatuan untuk mewujudkan Indonesia merdeka mampu menghilangkan sekat-sekat perbedaan. Perbedaan ras, bangsa, bahasa, dan agama dieliminasi demi terwujudnya persatuan.

KATA KUNCI - *Sumpah Pemuda, kesadaran berbangsa, gerakan kebangsaan*

ABSTRACT - The historical events of Soempah Pemoeda or Sumpah Pemuda (the Youth Oath) pledged on 28 October 1928 were major events in Indonesian history. The oath of youth was the commitment of Indonesian youth from various ethnic groups and religions to unite themselves to realize an independent Indonesia. This research was conducted to find answers on how the sense of one nation among young people was formed and who was the activator. The research was conducted by historical methods, using secondary sources. The findings indicated that education has given rise to awareness of the Indonesian people, that the ancestors of the Indonesian people were a great nation. Feodalism and occupation caused the Indonesian people to be a poor, ignorant and oppressed nation. Educated youth was an activator to Indonesian struggle. A sense of unity to create an independent Indonesia was able to eliminate the barriers of difference. Differences in race, nation, language and religion were eliminated for the sake of unity.

KEYWORDS - *Youth-oath, national-consciousness, national-movement*

PENDAHULUAN

Setiap tanggal 28 Oktober Bangsa Indonesia memperingati hari Sumpah Pemuda. Hari itu para pemuda Indonesia dari berbagai golongan menyatakan ikrar bersama mewujudkan persatuan se-

bagai Bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang luar biasa dalam sejarah Indonesia karena Bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa, budaya, dan agama rela melepaskan sekat-sekat

perbedaan demi mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka.

Kesadaran nasional lahir karena dibangkitkan oleh perasaan diskriminatif kolonial. Stratifikasi sosial yang dibentuk oleh pemerintah kolonial menempatkan Bangsa Indonesia sebagai pemilik tanah air menjadi kelas yang terbawah, di bawah golongan Eropa dan masyarakat Timur Asing seperti Cina dan Jepang. Sentimen sosial yang tercipta dalam sistem kolonial telah menumbuhkan kesadaran berbagai bangsa terjajah di wilayah Nusantara menjadi komunitas yang bernama Bumiputra. Mereka adalah kalangan tertindas yang kemudian bergerak untuk melepaskan diri dari penindasan.

Gerakan pemuda lahir dari kesadaran perlunya persatuan sebagai suatu bangsa. Mereka adalah orang-orang berpendidikan yang sadar terhadap nasib bangsanya yang terjajah. Pendidikan dan Buku-buku yang dibaca telah membuka mata mereka memahami gerakan-gerakan kebangsaan di berbagai negara.

Nilai-nilai perjuangan Bangsa Indonesia digali oleh para pemuda disebabkan oleh tiga pengalaman. *Pertama*, timbulnya kesadaran bahwa Bangsa Indonesia pernah mengalami kemajuan pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram di Nusantara telah mengalami kemajuan yang sejajar dengan kerajaan maju lainnya pada zaman itu. *Kedua*, feodalisme dan kolonialisme menyebabkan Bangsa Indonesia mengalami kemunduran. Zaman kejayaan yang membanggakan tenggelam oleh eksploitasi penjajah. Kekayaan alam dikeruk dan dibawa ke negara penjajah, sementara itu anak bangsa yang bekerja keras untuk menggali sumber-sumber alam, ti-

dak dapat memanfaatkan hasilnya. Sebagian besar hasil pertanian, tambang, dan hasil bumi lainnya dikirim ke negara induk penjajah. *Ketiga*, feodalisme dan penjajahan tersebut menimbulkan stratifikasi sosial, sehingga terjadi pengkelasan yang menempatkan Bangsa Indonesia dalam kelas sosial yang paling bawah, sebagai inlander, dan pribumi yang dilabeli sebagai bangsa pemalas, bodoh, dan miskin. Sementara itu bangsa pendatang seperti Cina, ditempatkan dalam kelas yang lebih tinggi di bawah bangsa Eropa, sedangkan bangsa Belanda sebagai bangsa penjajah ditempatkan dalam kelas sosial yang paling tinggi kedudukannya.

Tulisan ini memfokuskan pada peristiwa lahirnya sumpah pemuda dan latar belakang yang melahirkan sumpah pemuda. Makalah ini ditulis dengan menggunakan metode sejarah. Sumber yang digunakan adalah sumber skunder, didasarkan atas kajian terhadap berbagai tulisan dan opini tentang pemuda dan sumpah pemuda, yang ditulis oleh aktivis kepemudaan maupun akademisi.

LAHIRNYA SUMPAH PEMUDA

Batavia (Jakarta) bersama Surabaya, Semarang, dan Bandung merupakan kota-kota besar pada masa Hindia Belanda yang menjadi magnet bagi kaum muda dari seluruh negeri untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan. Kota-kota ini berkembang menjadi arena interaksi antar para pemuda yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, etnis, dan agama yang berbeda. Mereka mendirikan perkumpulan-perkumpulan pemuda sebagai wadah berdiskusi sesama anak

rantau. Pergaulan antarpemuda dengan beragam latar belakang ini memunculkan pemahaman terhadap adanya keanekaragaman budaya yang melahirkan saling pengertian antarsesama golongan.

Mereka saling bertemu dan berdiskusi di asrama-asrama pelajar dan mahasiswa. Salah satu tempat yang populer untuk tempat dikusi adalah Indonesia *clubgebouw* atau *Indonesische clubhuis* di Jalan Kramat Raya 106. Selain sebagai asrama dan tempat diskusi, juga merupakan tempat latihan seni bagi para pemuda. Gagasan penyelenggaraan kongres pemuda yang kemudian melahirkan “Sumpah Pemuda” dilahirkan di gedung ini, yaitu dalam rapat pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 1928. Meskipun semua yang hadir sepakat untuk menyelenggarakan kongres, tetapi detailnya belum sempat dibicarakan. Pembicaraan detail kongres pemuda baru dibicarakan dalam rapat yang diadakan pada tanggal 12 Agustus 1928. Rapat yang dihadiri oleh utusan pemuda dari Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), *Jong Java*, *Jong Islaminten Bond*, Pemuda Indonesia, *Jong Celebes*, *Jong Ambon*, *Jong Batak Bond*, dan Kaum Pemuda Betawi menyepakati susunan pengurus kongres, yang terdiri dari :

1. Ketua : Soegondo Djojopuspito dari PPPI
2. Wakil Ketua : Djoko Marsait dari *Jong Java*
3. Sekretaris : Moh. Yamin dari *Jong Sumatranen Bond*
4. Bendahara : Amir Syarifuddin dari *Jong Batak*

Pengurus lainnya adalah Djohan Muhammad (*Jong Islamieten Bond*), Kontjoso-

engkono (Pemuda Indonesia), Senduk (*Jong Celebes*), J. Leimena (*Jong Ambon*), dan Rohjani (Kaum Pemuda Betawi). Selain pembentukan pengurus, pertemuan menghasilkan kesepakatan:

1. Semua perkumpulan yang hadir sepakat mengadakan kongres di *Weltevreden* selama dua hari pada bulan Oktober 1928,
2. Biaya penyelenggaraan kongres dipikul bersama oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda serta sumbangan dari berbagai pihak,
3. Pada beberapa tempat di wilayah Indonesia akan dibentuk cabang-cabang panitia kongres yang bertugas membantu panitia dan mengumpulkan uang.
4. Meminta perkumpulan-perkumpulan pemuda lain yang tidak ikut dalam pertemuan tersebut untuk membantu usaha panitia dan ikut berperan serta dalam kongres.

Kongres yang kemudian diselenggarakan pada tanggal 27–28 Oktober 1928 tersebut bertujuan untuk melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia, membahas berbagai masalah mengenai pergerakan pemuda, dan memperkuat perasaan kebangsaan serta memperteguh persatuan Indonesia.

Selain organisasi pemuda, kongres juga dihadiri oleh organisasi-organisasi seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Budi Utomo, *Volksraad*, Persatuan Minahasa. Perorangan yang hadir antara lain Sarmidi Mangunsarkoro, Nona Purnomowulan, Muhammad Nazif, Siti Sundari, E. Puradiredja, Kuntjoro Purbopranoto, Sukmono, Surjadi, Djaksodipuro (Wongsonegoro), Moh. Roem, Dien Pantouw,

Suwirjo, Sumanang, Dali, Suahbudi Latif, Sulaiman, Kartomengolo, Sumarto, Masdani, Anwari, Nona Tumbel, Tamzil, A.K. Gani, Jo. Tumbuan, Pengemanan, Halim, Antapermana, Suwarni, Kasman Singodimedjo, dan W.R. Supratman (*Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, 1984: 69-72).¹

Rapat dibuka pada tanggal 27 Oktober 1928 pukul 19.30 di gedung *Katholieke Jongelingen Bond*, di Jalan Lapangan Banteng. Sebelum kongres dibuka, panitia terlebih dahulu membacakan sambutan tertulis dari Sukarno (PNI), dari pengurus Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda, dan sambutan pribadi Tan Malaka. Sugondo sebagai Ketua Panitia dalam sambutannya menjelaskan tentang sejarah pergerakan pemuda Indonesia, sebagai gerakan yang melatarbelakangi lahirnya kongres pemuda. Acara berikutnya adalah pidato Moh. Yamin yang berjudul “Persatuan dan Kebangsaan Indonesia”. Pidato Yamin lebih banyak membahas aspek-aspek sejarah Bangsa Indonesia yang memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam bahasa, kemauan, nasib, dan adat dari suku-suku bangsa di Indonesia.

Sidang kedua dilaksanakan di gedung *Oost Java Bioscoop*, di Jalan *Koningsplein Noord* (Merdeka Utara). Rencananya pada sidang kedua ini menghadirkan empat pembicara dengan tema pendidikan. Mereka adalah Nona Purnomowulan, Sigit, Djoko Sartono, dan Ki Hadjar Dewantoro. Dua orang yang disebut terakhir tidak dapat had-

ir karena ada di Yogyakarta. Sidang ketiga diselenggarakan di *Indonesische Clubhuis*, Jalan Kramat No. 106, dibuka pukul 19.30. Pada sidang ketiga ini rencananya akan dimulai dengan pawai pandu (*padvinderij*) tetapi dibatalkan karena tidak mendapat ijin dari pihak kepolisian. Tema sidang ketiga adalah kependuan, yang menghadirkan tiga pembicara, yaitu Ramelan, Theo Pangemanan, dan Mr. Sunario. Ketika Sunario masih berpidato, Yamin menyerahkan rumusan yang berisi pokok-pokok pikiran yang disampaikan selama kongres kepada Sugondo. Sugondo menerima rumusan yang disampaikan Yamin. Demikian juga dengan Amir Syarifudin. Rumusan itulah yang kemudian dibacakan dihadapan peserta kongres, yang kini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Rumusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Poatoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia

Kerapatan pemoeda-pemoeda Indonesia jang diadakan oleh perkoempoelan-perkoempoelan pemoeda-pemoeda Indonesia jang berdasarkan kebangsaan dengan namanya: Jong Java, Jong Soematra (Pemoeda Soematra), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islameten Bond, Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi, Perhimpunan Peladjar-Peladjar Indonesia.

Memboeka rapat tanggal 27 dan 28 October taoen 1928 di negeri Djakarta; sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pemitjaraan jang diadakan dalam kerapatan tadi; sesoedahnja menimbang segala isi pidato-pidato dan pemitjaraan ini; kerapatan laloe

¹ Dalam buku *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa* disebutkan bahwa jumlah peserta yang hadir pada Kongres Pemuda yang berlangsung antara tanggal 27 – 28 Oktober 1928 mencapai 750 orang. Jumlah ini mungkin dapat dikatakan mewakili berbagai kelompok organisasi pergerakan kebangsaan.

mengambil kepoatoesan:

Pertama, Kami poetera dan poeteri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia,

Kedua, kami poetera dan poeteri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, Bangsa Indonesia,

Ketiga, kami poetera dan poeteri Indonesia menjoenjoeng Bahasa persatoean, Bahasa Indonesia.

Setelah mendengar poatoesan ini kerapatan mengeloearkan kejakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkoempoelan-perkoempoelan kebangsaan Indonesia; mengeloearkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan persatoeannja kemaean, sedjarah, hoekoem-adat, pendidikan dan kepandoean dan mengeloearkan pengharapan soepaja poatoesan ini disiarkan dalam segala soerat kabat dan dibatjakan di moeka rapat perkoempoelan-perkoempulan kita.²

Sebelum putusan kongres tersebut dibacakan, peserta kongres terlebih dahulu mendengarkan alunan biola lagu Indonesia Raya, yang dibawakan oleh W.R. Supratman. Pada saat yang sama dikibarkan bendera merah putih, yang kemudian menjadi bendera nasional Indonesia. Dengan demikian, selain melahirkan komitmen untuk mewujudkan persatuan Indonesia, pada Sumpah Pemuda tersebut juga melahirkan simbol kebangsaan Indonesia lainnya, yaitu Indonesia Raya, dan Bendera Merah Putih (Suhartono, 1994: 79).

² Surat kabar *Pemoeda Soematra*, dalam buku *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan*, Jakarta: Kurnia Esa, halaman 78.

Sumpah pemuda yang dirumuskan dalam Kongres Pemuda Indonesia tersebut bukan peristiwa tunggal. Kongres pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda merupakan lanjutan dari kongres pemuda sebelumnya yang kemudian disebut sebagai Kongres Pemuda Indonesia I, yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 1926. Pada kongres tersebut, selain membicarakan pentingnya persatuan untuk mencapai Indonesia merdeka, juga sudah dimunculkan tentang perlunya bahasa persatuan yang disebut Bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang secara terus-menerus dilakukan oleh para pemuda Indonesia yang berpendidikan. Kesadaran sebagai bangsa yang muncul sejak awal abad ke-20, dengan begitu cepat bergulir menjadi gerakan-gerakan menuntut Indonesia merdeka.

PENDIDIKAN MELAHIRKAN KESADARAN BERBANGSA

Sumpah Pemuda merupakan produk kaum intelegensia sebagai penggerak “drama nasionalisme” Indonesia. Kelompok ini yang menciptakan identitas nasional dan kesadaran kolektif sebagai bangsa. Pengikat nasionalisme ditampilkan dalam butir teks Sumpah Pemuda, yaitu kesatuan wilayah, bangsa, dan bahasa (Suhartono, 1994: 79). Lahirnya kelompok intelegensia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan tentang pendidikan.³

Kebijakan politik liberal yang dijalankan oleh pemerintah kolonial sejak paruh kedua abad ke 19 membuka wa-

³ Peran golongan intelektual dalam perjuangan kemerdekaan telah banyak ditulis oleh para ahli, di antaranya adalah J.D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir*. Jakarta: Grafiti Press, 1993.

wasan baru perdagangan dunia. Ada dua hal yang mendapatkan perhatian kalangan industri di dunia. *Pertama*, Hindia Belanda, khususnya Jawa adalah pasar potensial bagi produk industri mereka karena jumlah penduduknya yang besar. Tetapi masyarakat Jawa ternyata tidak memiliki daya beli yang tinggi karena kemiskinannya. *Kedua*, Hindia Belanda dilihat sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, baik perkebunan maupun pertambangan.

Dalam sejarah Indonesia, kita bisa melihat produksi tembakau di pesisir Sumatra Timur yang dimulai tahun 1860 berkembang pesat dan merajai produksi tembakau dunia. Disusul kemudian lada, kopra di Sulawesi selain kopi dan gula di Jawa. Memasuki abad ke-20, Indonesia menyumbangkan dua komoditi yang sangat penting dalam perekonomian dunia, yaitu minyak bumi dan karet. Kandungan minyak di Langkat, Sumatra Utara sudah diketahui sejak tahun 1860an. Namun di daerah ini berkecamuk Perang Aceh sehingga tidak ada kestabilan keamanan untuk berinvestasi.

Eksploitasi pertambangan di Sumatera bermula dari Langkat. Pada tahun 1883 A.J. Zijlker mendapatkan konsesi dari pangeran Langkat untuk mengeksploitasi minyak bumi. Setelah melalui berbagai percobaan, akhirnya pada tahun 1900, Zijlker berhasil mengeksplor minyak ke kawasan Asia, seperti Cina dan India. Langkah A.J. Zijlker kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan pertambangan lainnya dari berbagai negara. Ricklefs mencatat sampai tahun 1920 ada kurang lebih 50 perusahaan yang berlomba menyedot minyak bumi yang ada di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Di

antara perusahaan-perusahaan itu, yang paling besar adalah Shell (Belanda), yang pada tahun 1930 memproduksi sekitar 85 % dari seluruh produksi minyak bumi Indonesia. Perusahaan lain yang masuk kategori besar adalah Caltex dan Stanvac (Amerika), dan Borneo Oil Company dari Jepang (Ricklefs, 2001: 321-322).

Pembukaan perkebunan maupun pertambangan ini memerlukan tenaga kerja terampil yang bergaji murah. Waktu itu masalahnya adalah penduduk Indonesia secara umum masih buta huruf sehingga tidak mungkin dapat dipekerjakan sebagai tenaga administrasi pada perusahaan-perusahaan perkebunan maupun pertambangan. Untuk tenaga kasar perkebunan di Sumatra Timur perusahaan perkebunan mendatangkan kuli-kuli kontrak dari Jawa dan Cina.

Kebutuhan tenaga administrasi yang terampil mendorong para pengusaha menekan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk membuka sekolah “bergaya barat” bagi penduduk pribumi. Ide pembukaan sekolah pribumi “bergaya barat” ini selain untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi perusahaan-perusahaan barat dan birokrasi kolonial, juga dimaksudkan untuk membendung pengaruh pendidikan Islam di pesantren-pesantren. Para orang tua lebih senang mengirimkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah agama di pesantren-pesantren supaya anak-anaknya menjadi anak saleh.⁴ Pemerintah Belanda merasa

4 Kesulitan untuk mendorong anak-anak petani di desa juga dirasakan oleh dinas penyuluhan pertanian, yang membutuhkan tenaga-tenaga penyuluh terampil guna membimbing petani-petani di pedesaan. Beberapa sekolah pertanian di desa, seperti di desa Sebandar, Cianjur terpaksa ditutup karena kekurangan murid. Anak-anak memilih memenuhi keinginan orang tua mengenai pendidikan agama dan moral. Lihat *Jaarverslag van den Landbouwwoorlichtingsdien*, 1923, halaman 78 – 79.

perlu membendung pengaruh pendidikan Islam karena hampir semua perlawanan (pemberontakan) yang muncul di berbagai wilayah pada abad 19, dipimpin oleh ulama. Masalah kemiskinan, dan buta huruf itulah yang antara lain melatarbelakangi lahirnya kebijakan Politik Etis, dengan tiga program utama yaitu pendidikan, irigasi, dan transmigrasi.

Meskipun semua pejuang Politik Etis sepakat bahwa pendidikan merupakan kebijakan strategis untuk membebaskan Bangsa Indonesia dari kemiskinan, namun dalam kenyataannya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh dua aliran kepentingan (politik) yang saling berlomba, sehingga hasilnya tidak fokus. Aliran pertama diikuti oleh kelompok yang berpendapat bahwa pendidikan hanya diberikan kepada kelompok elit Bangsa Indonesia. Bentuk pendidikan bergaya barat dengan pengantar Bahasa Belanda. Kelompok elit berpendidikan model Eropa ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan mengisi birokrasi kolonial yang akan tetap setia dan loyal kepada pemerintah Belanda sehingga dapat mengendalikan fanatisme Islam. Snouck Hurgronje dan Abendanon (Direktur Pendidikan 1900–1905) termasuk tokoh Etis yang mendukung pandangan ini. Di pihak lain, Idenburg dan Gubernur Jenderal van Heutsz (1904–1909) lebih mendukung pendidikan yang lebih mendasar dan praktis. Kelompok ini berpendapat bahwa pendidikan bukan hanya diberikan kepada kalangan atas dan elitis, tetapi juga diberikan kepada rakyat bawah dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya. Pendekatan populis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan langsung bagi peningkatan kesejahteraan

rakyat. Dalam praktiknya, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai sehingga kedua aliran tersebut tidak dapat menyelenggarakan programnya dengan baik.

Pendidikan model Eropa sangat mahal sehingga hanya orang-orang kaya dan priyayi tinggi dengan gaji besar yang dapat menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah-sekolah model barat (Riklefs, 2001: 330). Di samping itu, tidak semua anak Bangsa Indonesia yang mengikuti pendidikan gaya Eropa meninggalkan tradisi Islamnya. Meskipun mereka mengikuti pendidikan gaya Eropa, tetapi tetap saja mengikuti pendidikan agama di luar jam sekolah mereka. Mohammad Hatta misalnya, meskipun ia mengikuti pendidikan di MULO, ia tetap mengikuti pendidikan agama yang diikutinya dari ulama yang dihormati di keluarganya (Noer, 1990).

Memasuki awal abad 20, jumlah sekolah rendah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebesar 601 yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Di samping sekolah-sekolah tersebut, masih ada sekolah-sekolah yang didirikan oleh swasta yang umumnya diperuntukan bagi anak-anak Eropa sebanyak 359 sekolah, dan sekolah-sekolah yang didirikan Missie dan Zending serta sekolah-sekolah swasta milik tokoh-tokoh perjuang seperti Taman Siswa yang jumlahnya mencapai 451 sekolah, sehingga total sekolah yang ada hanya berjumlah 1.501 sekolah. Selain jumlahnya sedikit, penyebaran sekolah-sekolah tersebut di beberapa daerah jumlahnya tidak merata. Sebagai contoh untuk wilayah Minahasa yang jumlah penduduknya hanya 450 ribu jumlah sekolahnya mencapai 366 sekolah, masing-masing sekolah pemerin-

tah 115, partikelir 14, dan gereja 237. Sedangkan seluruh wilayah Sulawesi lainnya jumlahnya tidak lebih dari 20 sekolah (Poesponegoro, 1990: 126).

Sekolah-sekolah menengah secara umum hanya ada di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Karena itu bagi putra-putra daerah yang ingin melanjutkan sekolahnya ke tingkat menengah, mereka harus pergi ke Jakarta, yang jauh dari tempat tinggal mereka. Misalnya Mohammad Hatta, setelah lulus ELS, di Bukittinggi, ia meneruskan pendidikannya MULO di kota Padang dalam usia 13 tahun. Dalam usia 17 tahun ia merantau lagi ke kota yang lebih jauh, yaitu Jakarta untuk meneruskan pendidikannya di *Prins Henrik Handels* (PHS) sekolah dagang yang diikutinya dari tahun 1919 – 1921. Kemudian ketika usianya mencapai 19 tahun ia pergi ke Belanda untuk melanjutkan pendidikannya (Noer, 1990: 19–37). Di perantauan, mereka hidup bersama teman-temannya dari daerah lain di Indonesia. Mereka membentuk komunitas sebagai intelektual muda yang kemudian menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang terjajah (yang kemudian bernama Indonesia) yang harus berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Kaum intelektual muda tersebut selalu berdiskusi, membahas situasi politik, perlakuan diskriminatif terhadap mereka di sekolah-sekolah mereka, dan gerakan kebangsaan dari berbagai Negara. Meskipun buku-buku zaman itu susah didapat, tetapi semangat membaca yang tinggi di kalangan mereka membuat wawasan mereka, dan kemampuan nalar mereka, berkembang melampaui usia mereka.

Demikian juga dengan mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda.

Mereka bisa bertemu dengan mahasiswa Indonesia lainnya yang berasal dari berbagai daerah. Mereka bahkan dapat bekerja sama dalam suatu organisasi yang bernama Perhimpunan Indonesia (PI). Dalam kepengurusan PI tahun 1923, Iwa Kusumasumantri sebagai ketua, berasal dari Ciamis, Jawa Barat; didampingi J.B. Sitanala sebagai sekretaris yang berasal dari Ambon; bendahara Mohammad Hatta dari Bukittinggi, dan Pemegang arsip Darmawan Mangunkusumo yang berasal dari Purwodadi, Jawa Tengah (Ingleson, 1993 : 6). Di negeri Belanda mereka tidak mengalami perlakuan diskriminatif seperti yang dialami di Hindia Belanda, sehingga mereka merdeka untuk bergaul, mengungkapkan pendapat, dan berkomunikasi dengan siapa saja, termasuk dengan tokoh-tokoh pergerakan dari berbagai Negara lainnya. Bahkan, Tan Malaka di negeri Belanda pernah ikut berkompetisi untuk duduk dalam parlemen Belanda.

Di antara segelintir pemuda yang luar biasa yang dapat melanjutkan pendidikan sampai ke pendidikan tinggi, masih jauh lebih banyak putra-putra Bangsa Indonesia yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan sangat terbatas jumlahnya, dan hanya orang-orang tertentu yang dapat menikmatinya. Dengan kecilnya jumlah sekolah dibanding jumlah penduduk tidak heran jika jumlah melek huruf Bangsa Indonesia rendah sekali. Berdasarkan data sensus yang ada, pada tahun 1930 jumlah penduduk Bangsa Indonesia yang dapat membaca dan menulis hanya 6,44 persen dari 70 juta penduduk. (Poesponegoro, 1990: 124). Angka tersebut menggambarkan betapa beratnya perjuangan kaum intelektual muda Bangsa Indonesia un-

tuk mendorong rakyat Indonesia berjuang menjadi bangsa yang merdeka. Perjuangan berat mereka bertambah dengan rendahnya sarana transportasi dan komunikasi. Untuk menyampaikan ide-ide perjuangannya mereka harus pergi ke daerah-daerah dengan menggunakan sarana transportasi ala kadarnya. Sarana komunikasi waktu itu tidak sehebat seperti sekarang sehingga mereka harus selalu terjun ke lapangan.

LAHIRNYA GERAKAN KEBANGSAAN

Pendidikan yang diikuti oleh sebagian kecil rakyat Indonesia telah menumbuhkan rasa kesadaran berkebangsaan. Melalui bacaan mereka dapat mengetahui bagaimana Jepang sebagai negara Asia, dapat mengalahkan Rusia sebagai simbol barat yang lebih modern dan maju. Mereka juga dapat melihat bagaimana gerakan Turki Muda dalam mewujudkan negara modern. Melalui bacaan, mereka juga dapat mengetahui Revolusi Perancis, Revolusi Industri di Inggris, bahkan di Indonesia sendiri mereka dapat mengetahui bahwa Bangsa Indonesia sudah pernah menjadi bangsa yang maju, melalui kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Melalui bacaan, mereka dapat menggali kejayaan masa lalu bangsanya yang kemudian menjadi bodoh, miskin, dan tertinggal karena dijajah oleh bangsa lain. Itulah yang melatarbelakangi lahirnya kesadaran kebangsaan kaum terdidik Indonesia. Gerakan tersebut ditandai dengan lahirnya berbagai organisasi kebangsaan yang modern.

Organisasi yang pertama dibentuk adalah Budi Utomo (20 Mei 1908). Organisasi ini pertama kali dibentuk dengan maksud

untuk menghimpun dana beasiswa pendidikan bagi kalangan priyayi Jawa. Mereka menyadari perlunya pendidikan untuk membangun negara yang lebih maju. Melalui pendidikan, Bangsa Indonesia dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Problemanya adalah mahalnnya biaya pendidikan. Pendidikan hanya dapat dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu. Pendirian organisasi ini dimotori oleh seorang dokter Jawa, Wahidin Sudirohusodo. Ia resah terhadap sistem pendidikan yang elitis. Lembaga pendidikan jumlahnya sedikit. Biaya pendidikan mahal sehingga sulit dijangkau bagi Bangsa Indonesia kebanyakan. Sejak tahun 1906 ia mencoba keliling Jawa menemui bupati-bupati membicarakan masalah *studiefonds* bagi Bangsa Indonesia khususnya bagi kalangan priyayi Jawa. Di sini usahanya kurang berhasil. Ia akhirnya berkunjung ke STOVIA. Di sekolah ini ia bertemu dengan dr. Sutomo, yang langsung mendukung usahanya, dan kemudian dikonkretkan dengan pendirian organisasi yang diberi nama Budi Utomo (Pringgodigdo, 1986: 1).⁵

Kelahiran Budi Utomo memberikan inspirasi bagi kalangan intelektual lainnya untuk membentuk organisasi guna mewujudkan cita-citanya, meskipun gerakannya baru berkisar pengumpulan beasiswa bagi putra-putra (bangsawan) Jawa untuk dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi

⁵ Kajian tentang Budi Utomo secara mendalam telah dilakukan oleh seorang sarjana (dan keturunan bangsawan) Jepang, Akira Nagazumi dengan judul, *The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of the Budi Utomo, 1908 – 1918*, diterbitkan oleh Institute of Developing Economies, Tokyo, tahun 1972. Edisi Indonesianya diterjemahkan oleh sebuah tim yang dibentuk atas kerja sama antara KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) bekerja sama dengan LIPI dan diterbitkan dengan judul, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908 – 1918* oleh Grafitipress pada tahun 1989.

sehingga dapat memperoleh tingkat pendidikan yang sederajat dengan anak-anak Bangsa Belanda. Pada tahun 1909, Tirtoadisuryo, lulusan OSVIA yang seharusnya bekerja pada dinas pemerintahan, mengundurkan diri menjadi *ambtenar* dan memilih menjadi wartawan, dan mendirikan organisasi yang diberi nama Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia dan kemudian di Bogor (1910). Organisasi ini dimaksudkan untuk membantu pedagang-pedagang Indonesia.⁶

Pada tahun 1911 Tirtoadisuryo mendorong H. Samanhudi, seorang pedagang batik yang sukses di Surakarta untuk mendirikan Sarekat Dagang Islam sebagai suatu usaha koperasi bagi pedagang batik. Usaha ini menarik H.O.S. Cokroaminoto yang juga lulusan OSVIA yang tidak mau bekerja pada dinas pemerintah, untuk mendirikan cabang Sakrekat Dagang Islam di Surabaya. Pada tahun 1912 Sarekat Dagang Islam berganti nama menjadi Sarekat Islam (SI) yang dipimpin oleh Cokroaminoto.

Karena kepemimpinan Cokroaminoto yang cemerlang, maka dalam waktu cepat SI berkembang dengan sangat pesat. SI berkembang menjadi organisasi massa dan merupakan organisasi pertama di Indonesia yang memiliki basis rakyat yang memiliki anggota hingga dua juta orang pada tahun 1919 (Ricklefs, 2005: 347–348). Karena jumlah anggotanya yang besar, SI memiliki potensi untuk tumbuh sebagai organisasi

yang mampu menyatukan Bangsa Indonesia. Faktor Islam menjadi pendorong organisasi ini lebih cepat berkembang.

Pada tahun yang hampir bersamaan, lahir sebuah partai yang lebih radikal, yaitu *Indische Partij* (1911) yang dipimpin oleh Douwes Dekker bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini mungkin dapat dikatakan sebagai organisasi politik yang membangun kesadaran bangsa. Partai ini mengikrarkan nasionalisme untuk bangsa Hindia dan menuntut kemerdekaan bagi bangsa Hindia. Karena sifat dan tuntutan yang radikal, pemerintah Hindia Belanda membubarkannya dan mengasingkan pemimpin utamanya ke negeri Belanda. Meskipun demikian, semangat perjuangan ketiga pimpinan *Indische Partij* ini tidak pupus meskipun mereka ada di pengasingan. Gagasan dan ide-ide kemerdekaan selanjutnya dilakukan oleh *Insulinde* (Surjaningrat, 1986: 417).⁷

Kesadaran ke-Indonesiaan pun menjadi semakin menguat. Kata “Indonesia” sebagai satu entitas bangsa semakin terasa dan memberikan identitas baru baru putra-putri Bangsa Indonesia. Semangat ke-Indonesiaan semakin jelas setelah Iwa kusumasumnatri memimpin *Indonesische Vereeniging* (IV). Sebagai ketua baru IV, pada awal Januari 1923, Iwa menekankan perjuangan politiknya dalam tiga hal, yaitu, *Pertama*, Indonesia harus menentukan nasib sendiri; *Kedua*, untuk dapat menentukan nasibnya sendiri, Bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri; *Ketiga*, ia mengajak

6 Tirtoadisurya sendiri kemudian sukses dalam bidang jurnalisme. Pada tahun 1903 Ia mendirikan *Soenda Berita*, mingguan berbahasa Melayu pertama yang didanai dan dikelola oleh Bangsa Indonesia. Di samping itu ia juga mendirikan mingguan *Medan Prijaji* (1907) yang kemudian menjadi harian (1910) yang merupakan surat kabar harian pertama yang dikelola oleh Bangsa Indonesia (lihat Ricklefs, 2005: 347). Tirtoadisuryo merupakan tokoh yang diangkat dalam novel Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*.

7 Tulisan ini diberi pengantar oleh Abdurrachman Surjomohardjo, yang dimuat dalam buku *Bunga Rampai Soempah Pemoeda*, yang dihimpun oleh Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah dan diterbitkan oleh Balai Pustaka, 1986.

seluruh Bangsa Indonesia bersatu untuk melawan Belanda. Sebagai ketua IV, Iwa-pun menyerukan agar para mahasiswa di Belanda terus mengikuti perkembangan politik di tanah air. Dalam sambutannya ketika diangkat menjadi ketua IV, Iwa menyatakan bahwa masa depan Bangsa Indonesia semata-mata dan hanya terletak pada kelembagaan dan bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam arti yang sebenarnya. Untuk tujuan tersebut, setiap orang Indonesia harus berjuang sekuat tenaga dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri dan bebas dari bantuan asing (Ingleson, 1993: 6–7).

Kegiatan politik IV untuk mewujudkan kemerdekaan Bangsa Indonesia semakin jelas dengan mengubah nama IV menjadi *Indonesische Vereeniging* (Perhimpunan Indonesia yang disingkat dengan PI) pada tahun 1924, dan mengubah nama majalahnya dari *Hindia Poetra* menjadi Indonesia Merdeka. Mulai saat itu, merekapun menyatakan bahwa “Indonesia merdeka” menjadi semboyan pemuda Indonesia. Dengan demikian nama *Indie* tidak lagi digunakan sebagai nama organisasi pergerakan.

Perubahan nama dari IV menjadi PI menunjukkan gerakan kebangsaan Indonesia menemukan identitas baru, yaitu identitas Indonesia. PI adalah organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia pada tahun 1922, kemudian diikuti oleh Soetomo yang menggunakan organisasinya dengan nama *Indonesische Studie Club* tahun 1924. Sukarno kemudian mendirikan Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Nama Indonesia sendiri awalnya populer di kalangan akademisi. Pertama kali dikemukakan oleh George Samuel Windsor Earl, Etnolog Inggris dalam artikelnya yang

dimuat dalam *Jurnal of The Indian Archipelago and Earstern Asia* Vol. IV tahun 1850 dengan nama Indunesia. Pada jurnal yang sama dan volume yang sama, James Ricahardson Logan mengganti huruf u dan Indunesia-nya Earl menjadi Indonesia. Kemudian pada tahun 1884 Adolf Bastian, seorang ahli etnologi di Universitas Berlin menerbitkan buku yang diberi judul *Indonesien oder die Inseln des Malayschen Archipel* sebanyak lima volume.

Ingleson mencatat bahwa PI merupakan organisasi nasionalis Asia yang paling awal menuntut kemerdekaan segera dan tidak bersyarat. Radikalisme pemuda nasionalis Indonesia ini oleh Ingleson dilihat sebagai refleksi dari gerakan nasionalis Indonesia. Perjuangan mereka yang radikal dapat dilihat pula dari artikel-artikel yang diterbitkan melalui *Indonesia Merdeka*. Sebuah artikel yang terbit pada Februari 1925, misalnya diberi judul, *Trijdaan Twee Front* (perjuangan di dua front) menyatakan bahwa perjuangan Bangsa Indonesia akan lebih berat dan lebih pahit tetapi tidak dapat dihindari. Bangsa Indonesia harus bersedia mengorbankan semua daya dan kepercayaannya jika ingin mencapai kemerdekaan. Perjuangan bukan hanya satu front, tetapi sekaligus dua front, karena perjuangan mereka tidak hanya melawan Pemerintah Belanda, tetapi juga Bangsa Indonesia sendiri yang menentang perjuangan kaum nasionalis (Ingleson, 1993: 9, 11). Manifesto politik yang dikumandangkan oleh Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 menunjukkan bahwa gerakan nasionalis semakin jelas merumuskan arahnya. Di dalam manifesto tersebut tercakup prinsip-prinsip nasionalisme seperti kebebasan atau kemerdekaan, kesatuan,

dan kesamaan (Kartodirdjo, 1993: xi).

Gerakan radikal dari mahasiswa Indonesia di Belanda mempengaruhi gerakan kebangsaan di Indonesia. Organisasi-organisasi pemuda di Indonesia sejak awal tahun 1920an mulai intens mengadakan berbagai pertemuan untuk menyatukan langkah guna terwujudnya kemajuan bangsa. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, intensitas hubungan dan keterkaitan satu organisasi dengan organisasi lainnya semakin tinggi. Hal inilah yang mempertebal semangat persatuan dan semangat kebangsaan bagi tokoh-tokoh pemuda waktu itu. Dari risalah kongres beberapa organisasi pemuda waktu itu seperti *Jong Java*, *Jong Sumatera*, *Jong Islamiten Bond*, *Jong Batak*, Pemuda Indonesia, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), tampak adanya hasrat untuk bersatu. Dari semangat untuk bersatu tersebut, lahirlah gagasan untuk menggelar kongres akbar pemuda Indonesia (Kerapatan Besar Pemuda). Pada tanggal 15 November 1925 terbentuklah panitia kongres yang dipimpin oleh Tabrani (*Jong Java*), dengan anggota antara lain Bahder Djohan (JSB), Jan Toule Soulehuway (*Jong Ambon*), Paul Pinontoan (*Jong Minahasa*), dan Sanusi Pane (*Jong Batak*).⁸ Kongres yang kemudian disebut dengan Kongres Pemuda Indonesia ke-1 diadakan pada 26 April 1926. Dalam sambutannya sebagai ketua Panitia, M. Tabrani mengatakan "... kita semua orang-orang Jawa, Sumatera, Minahasa, Ambon, dan lain-lain, oleh sejarah dijadikan mahluk yang harus saling mengulur tangan, bilamana kita mencapai apa yang menjadi cita-cita kita semua, yaitu kemerdekaan Indonesia,

⁸ Lihat Yayasan Sumpah pemuda, *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Kurnia Esa, 1984.

tanah air yang kita cintai..." (*Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, 1984: 60).⁹ Meskipun diskusi dalam kongres ini secara umum menggunakan Bahasa Belanda, tetapi telah muncul gagasan tentang adanya bahasa nasional, yang disebut Bahasa Indonesia. Ada dua bahasa yang waktu itu dominan untuk dijadikan bahasa persatuan, yaitu Bahasa Jawa dan Bahasa Melayu (Djohan, 1986: 183).

Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia pada masa itu bukan hal yang mudah. Dalam sejarah Indonesia, periode ini adalah periode represif. Pemerintah kolonial mengambil tindakan keras terhadap pemimpin organisasi yang non kooperatif (tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan kolonial). Meskipun demikian, tindakan keras yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap tokoh-tokoh pemuda dan pergerakan lainnya tidak menyurutkan semangat gerakan anti kolonial. Semakin represif tindakan pemerintah, semakin menggelora pula tuntutan untuk merdeka. Gerakan-gerakan non kooperatif semakin lantang menyuarakan persatuan dan kemerdekaan Bangsa Indonesia (Wahyono, 2013). Hasil konkret pertemuan tersebut adalah diselenggarakannya Kongres Pemuda Indonesia ke-2 pada tanggal 28 Oktober 1928, yang berhasil mengeluarkan ikrar bersama yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Di dalam naskah sumpah pemuda itu ada satu kalimat penutup yang selama ini terlupakan, yang berbunyi: "...mengeluarkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan persa-

⁹ Lihat Effendi Wahyono, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pergerakan Kebangsaan Dalam Pendidikan Karakter Bangsa" makalah yang disajikan dalam seminar di Perpustakaan Universitas Airlangga, Surabaya 29 April 2014.

toeannja: kemaoean, sedjarah, hoekoem adat, pendidikan dan kepandoean...”. Kalimat itu menunjukkan bahwa terbentuknya identitas sebagai Bangsa Indonesia karena adanya kesatuan kemauan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Perasaan persamaan satu bangsa, tanah air, dan bahasa tersebut kemudian diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk menyiapkan Indonesia merdeka. Seperti halnya dalam Kongres Pemuda Indonesia I, dalam Kongres Pemuda Indonesia II kata “persatuan” menjadi marwah perjuangan kemerdekaan.

Ikrar pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah kesadaran sebuah *nation* bagi Bangsa Indonesia. kesadaran in baru muncul pada awal abad ke-20, yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi etnis, budaya, agama, maupun bahasa. Harsya W. Bachtiar, membandingkan Bangsa Indonesia ketika itu tidak dengan satu bangsa saja seperti Arab, Jerman, Italia, atau Perancis, melainkan dengan penduduk seluruh benua Eropa. Penduduk benua Eropa terdiri atas berbagai bangsa, yang kemudian terbagi lagi menjadi berbagai negara, dengan berbagai agama yang dipeluknya.

Ketika negara-negara Eropa banyak menghadapi perang dalam pembantukan negara bangsa, berbagai suku bangsa di Indonesia justru membentuk gerakan yang melahirkan kesadaran nasional sebagai bangsa yang mereka namakan Indonesia. Penduduk kepulauan Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dengan bahasanya masing-masing. Pendudukan di seluruh kepulauan Indonesia juga memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda-beda. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buda dan

berbagai aliran kepercayaan lainnya. Sebelum munculnya kesadaran nasional, di Indonesia juga banyak kerajaan. Bahkan sampai Indonesia merdeka, di Jawa Tengah masih ada empat kerajaan merdeka, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaran. Di luar itu, masih banyak bangsa di Indonesia yang merdeka, sama seperti negara-negara di benua Eropa (Bachtiar, 1981: 27). G.J. Resink bahkan berpendapat bahwa sampai tahun 1915, masih banyak kapal di laut Nusantara yang berbendera berbagai kerajaan di Indonesia. Bendera-bendera tersebut berdasarkan kajian hukum internasional menurut Resink menunjukkan masih banyaknya kerajaan merdeka di Indonesia (Resink, 2017).

Meskipun demikian, tokoh-tokoh pergerakan Indonesia pada awal abad ke-20 dapat mengesampingkan perbedaan latar belakang tersebut demi mewujudkan persatuan nasional untuk mencapai Indonesia merdeka. Semua organisasi pemuda waktu itu menyadari penuh perlunya persatuan untuk dapat mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kongres pemuda Indonesia pertama terjadi karena terbentuknya sebuah komite yang anggotanya meliputi pengurus berbagai organisasi pemuda yang menginginkan terbentuknya sebuah badan sentral yang bertujuan untuk memajukan faham persatuan kebangsaan. Di samping itu, badan sentral juga diharapkan dapat mengeratkan hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Keinginan untuk mewujudkan badan sentral organisasi pemuda juga yang mendorong dilaksanakannya kongres pemuda Indonesia yang kedua (Pringgodigdo, 1986: 105–105). Walaupun badan sentral gerakan pemuda seperti yang diinginkan berbagai

organisasi pemuda tidak terbentuk, namun kongres pemuda Indonesia yang kedua tersebut menghasilkan suatu kesepakatan yang sangat monumental, yang dikenal dengan Sumpah Pemuda.

Gerakan pemuda yang melahirkan semangat kebangsa berjalan tidak memakan waktu lama. Kesadaran berbangsa, kalau tonggaknya dimulai sejak berdirinya Budi Utomo pada dapat disebut sebagai benih lahirnya suatu persatuan dan kesadaran sebagai suatu bangsa mulai pada tahun 1908. Bahkan dalam organisasi seperti Budi Utama pada awal kelahirannya memiliki berbagai aliran, yang oleh Sartono Kartodirdjo dikelompokkan sebagai aliran tradisional yang diwakili oleh dr. Radjiman Widiodinigrat, dan golongan intelegensia progresif yang diwakili oleh dr. Tjipto Mangoenkoesoemo.

Konfrontasi kedua aliran tersebut secara terbuka ditunjukkan dalam kongres *Jong Java* di Yogyakarta, pada tanggal 5 Oktober 1908. Perdebatan antara kedua kelompok tersebut bukan hanya soal arah dan tujuan pergerakan, tetapi bahkan bahasa yang digunakan. Kelompok pertama menggunakan Bahasa Jawa dan kelompok kedua menggunakan Bahasa Melayu. Golongan pertama menghendaki langkah secara bertahap dalam mencapai kemajuan dengan mengikuti tahapan jenjang yang ditetapkan oleh penguasa, sedangkan kelompok kedua menghendaki gerakan politik yang bersifat radikal untuk mendo-brak masyarakat kolonial yang kolot, statis, dan diskriminatif. Ide dan gagasan Tjipto yang revolusioner dengan jangkauan jauh ke masa depan belum banyak menarik perhatian dalam organisasi Budi Utomo (Kartodirdjo, 1993: 103).

Sikap revolusioner Tjipto selanjutnya terwadahi dalam *Indische Partij*, sebuah organisasi yang didirikannya bersama Ki Hadjar Dewantara dan E.F.E. Douwes Dekker pada tahun 1912. Tujuan organisasi ini sangat jelas, yaitu kemerdekaan bagi Bangsa Hindia. Tuntutan agar Hindia mendapatkan kemerdekaan penuh kembali disampaikan oleh Abdul Muis (Sarekat Islam) dan R. Ng. Dwidjosewojo (Budi Utomo) pada tahun 1917 ketika keduanya menghadap parlemen Belanda bersama anggota *Comite Indie Weerbaar* (Komite Ketahanan Hindia) lainnya seperti utusan dari *Prinsen Bond* (Persekutuan Bangsawan Yogyakarta), *Regenten Bond* (Perkumpulan para bupati), dan Perserikatan Minahasa. Mereka belum menggunakan kata “Indonesia”.

Kata Indonesia baru digunakan pada tahun 1922. Sebelumnya ada beberapa nama yang digunakan untuk menyebut Indonesia. Nama yang paling lazim adalah *Indische* atau *Indie*, Edward Douwes Dekker dalam karyanya yang terkenal *Max Havelaar*, menggunakan nama *Insuliede*, dan Sukarno dalam otobiografinya mengklaim pernah menggunakan nama Nusantara untuk menyebut Indonesia (Nagazumi, 1976: 6 – 12). Ketika para mahasiswa Indonesia di Belanda mengganti nama organisasinya dari *Indische Vereeniging* menjadi *Indonesische Vereeniging* kata Indonesia menjadi simbol dari persatuan organisasi-organisasi pergerakan. Sejak itu, gerakan mahasiswa Indonesia di Belanda menyatakan bahwa “Indonesia merdeka” merupakan semboyan dari gerakan pemuda Indonesia. Radikalisme gerakan pemuda Indonesia di Belanda oleh Engleson dilihat sebagai refleksi gerakan nasionalisme Indonesia (En-

gleson, 1993).

PENUTUP

Kesimpulan

Sumpah pemuda yang diikrarkan tanggal 28 Oktober 1928 merupakan peristiwa besar dalam sejarah Indonesia. Dalam peristiwa tersebut, para pejuang bangsa bukan hanya berikrar menyatakan sebuah negara bangsa dan tanah air dengan bahasa kesatuan yang disebut Indonesia. Di sini mereka juga pertama kali mendengarkan musik Indonesia Raya mengiringi pengibaran bendera mereka putih, yang juga pertama kali dikibarkan. Peristiwa tersebut menunjukkan lahirnya sebuah kesadaran nasional untuk menyatukan diri dalam sebuah bangsa yang bernama Indonesia.

Gerakan kebangsaan lahir digerakan oleh para pemuda berpendidikan. Pendidikan yang mengantarkan mereka bertemu, berinteraksi dengan sesama peserta didik dari berbagai suku bangsa, daerah, dan agama. Mereka umumnya tinggal di asrama-asrama mahasiswa, dan berhimpun dalam diskusi-diskusi kebangsaan, yang membuka cakrawala dunia. Mereka mempelajari gerakan-gerakan nasionalisme dari berbagai negara. Kesadaran berbangsa tumbuh dan bergerak dengan sangat cepat. Jika Budi Utomo yang lahir pada 1908 disebut sebagai tonggak lahirnya kesadaran berbangsa, maka sumpah pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 merupakan tonggak dari berdirinya sebuah bangsa. Rasa toleransi, penghargaan terhadap perbedaan menjadi modal dari tumbuhnya persatuan menuju Indonesia merdeka. Jika ditarik dari tahun

1908, sejak berdirinya Budi Utomo hingga pernyataan sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 hanya berlangsung dalam kurun waktu 20 tahun. Sejak tahun 1928, perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda dapat dikatakan sebagai perlawanan Bangsa Indonesia *de facto*, melawan penjajahan Belanda.

Saran

Perlu dilakukan kajian akademik tentang Sumpah Pemuda. Kajian ini dilakukan dengan menggali sumber-sumber primer yang berkaitan dengan peristiwa sumpah pemuda. Selain dari pernyataan dan kisah romantis para pemuda yang mengalami peristiwa tersebut, kajian ini perlu juga menggali sumber primer yang tersimpan dalam arsip di Arsip Nasional RI, maupun sumber-sumber dari berita berbagai surat kabar sezaman yang tersimpan di Perpustakaan Nasional RI. Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan peristiwa besar, sehingga tentu menjadi pemberitaan berbagai surat kabar yang terbit pada sekitar tanggal peristiwa tersebut terjadi. Kajian tentang sumpah pemuda juga perlu dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber arsip untuk mengetahui bagaimana sikap pemerintah Hindia Negara sebagai penyelenggara pemerintahan tentang pernyataan bangsa Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam teks Sumpah Pemuda. Kajian tersebut akan memiliki dampak besar terhadap pelestarian nilai-nilai perjuangan untuk pendidikan karakter generasi muda Indonesia masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (1972). *Java in a Time of Revolution, Occupation, and Resistance. 1944-1946*. Itaca: Cornell University Press.
- Bachtiar, H.W. (1981), 'Sekali Lagi Persatuan Bangsa', dalam Oemar Bakry, *Bunga Rampai Sumpah Pemuda: Satu Bahasa, Bahasa Indonesia*. Jakarta: Mutiara.
- Bertrand, J. (2012). *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak
- Departemen van Landbouw, Nijverheid en Handel (1923). *Jaarverslag van den Landbouwvoorlichtingsdienst over 1920-1921*. Weltreveden: Landsdrukkerij.
- Djohan, Bahder (1986). 'Menuju ke Sumpah Pemuda', dalam Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah, *Bunga Rampai Soempah Pemoeda*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ingleson, J. (1993). *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Grafiti Press.
- Kahin, J. McT. (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pengantar Sejarah Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Legge, J.D. (2003). *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir*. Jakarta: Grafiti.
- Miert, H.V. (2003). *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia*. Jakarta: Hasta Mitra & Pustaka Utan Kayu
- Nagazumi, Akira (1976). 'Indonesia dan orang-orang Indonesia, Semantik dalam Politik', dalam S. Ichimura dan Koentjaraningrat, *Indonesia: Masalah dan Peristiwa Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor
- _____. (1989). *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Otomo 1808-1918*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Niel, Robert Van. (1960). *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. Den Haag: Uitgeverij W. Van Hoeve
- Noer, D. (1990). *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES
- Poeponegoro, J., Notosusanto, N. (1990). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*: Jakarta: Balai Pustaka
- Pringgodigdo, AK (1986). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Rahmat (2003). 'Sumpah pemuda: antara idealisme dan realisme pendidikan politik'. *Jurnal Pendidikan Islam* Volume 1 (no. 1).
- Resink, G.J. (2017.) *Bukan 350 Dijajah*, Yogyakarta: Ombak
- Ricklefs, M.C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Sejarah Nama Indonesia (2018). Tersedia pada www.id.wikipedia.org/wiki/sejarah_nama_Indonesia. Diakses tanggal 31 oktober 2018.
- Sutherland, H. (1979). *The Making of a Bureaucratic Elite*. Singapore; Heinemann Educational Books
- Yayasan Gedung-gedung Bersejarah (1986). *Bunga Rampai Soempah Pemoeda*. Jakarta: Balai Pustaka
- Yayasan Sumpah pemuda. (1984). *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Kunia Esa.
- Wahyono, Effendi (2013). 'Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah Kebangkitan Nasional', disampaikan pada orasi ilmiah Wisuda UT Periode I tahun 2013.
- _____. (2014) Effendi Wahyono, 'Aktualisasi Nilai-Nilai Pergerakan Kebangsaan dalam Pendidikan Karakter Bangsa' makalah disajikan dalam seminar di Perpustakaan Universitas Airlangga, Surabaya, 29 April 2014.